

STRATEGI PENGEMBANGAN KOMUNITAS PETERNAK SAPI DI WILAYAH PERBATASAN NEGARA (Studi Kasus: Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur)

Adventus Daniel Hamonangan¹, Bambang Shergi Laksono²
Universitas Indonesia

Article Info Article history: Received 12 November 2021 Publish 12 November 2021	Abstrak <i>This study discusses the Community Development Strategy for Cattle Breeders in Border Areas, Belu Regency. This research on the development strategy of the cattle rancher community will be analyzed in terms of planning and policy, political and social action, and awareness and education. This study uses a qualitative method with purposive sampling. The results of this study are the first strategy in community development used in planning in making programs/policies that are bottom-up by considering the skills of the local community. Cattle raising is one of the skills in the Belu Regency. These skills then included in the government's priority program through Presidential Instruction No. 1 of 2021. The Mootaa'in border area in Belu Regency is given a program to provide cattle seeds and prepare a market for selling their livestock. The second strategy is to carry out political and social actions, such as participation in farmer groups and social support among farmer groups. The third strategy is awareness and education. This strategy is implemented by providing training for cattle farmers. The training provided is various, such as inseminator training, namely artificial insemination of cattle, processing of feed for ruminants, and procedures for cultivating forage for livestock. Recommendations from this research are that it is necessary to strengthen farmer group communities, support CSR in program development, and add professionals from the central government in Belu Regency.</i>
Keywords: <i>Strategy, Community Development, Cattle Breeders, Border Areas</i>	
Info Artikel Article history: Diterima 12 November 2021 Publis 12 November 2021	Abstrak Penelitian ini membahas mengenai strategi pengembangan komunitas peternak sapi di wilayah perbatasan negara, Kabupaten Belu. Pengembangan yang dilakukan pemerintah di Kabupaten Belu berupa pengembangan komunitas peternak sapi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pengambilan sampling dengan cara purposive sampling. Hasil dari penelitian ini yaitu strategi pertama dalam pengembangan komunitas yang digunakan perencanaan dalam pembuatan program/kebijakan yang bersifat <i>bottom up</i> dengan mempertimbangkan keterampilan masyarakat setempat. Beternak sapi merupakan salah satu keterampilan di Kabupaten Belu. Keterampilan tersebut kemudian dimasukkan ke dalam program prioritas pemerintah melalui Inpres No. 1 Tahun 2021. Daerah perbatasan Motaain yang terdapat di Kabupaten Belu diberikan program pemberian bibit sapi dan mempersiapkan pasar raya untuk menjual hasil ternaknya. Strategi kedua yaitu dengan melakukan aksi politik dan sosial, seperti partisipasi kelompok peternak dan juga dukungan sosial antar sesama kelompok peternak. Strategi ketiga yaitu dengan kesadaran dan pendidikan. Strategi ini diimplementasikan dengan cara peternak sapi diberikan pelatihan. Pelatihan yang diberikan bermacam-macam seperti pelatihan inseminator, yaitu inseminasi buatan pada ternak sapi, pengolahan pakan untuk ternak ruminansi, dan juga tata cara budidaya hijauan pakan ternak. Rekomendasi dari penelitian ini yaitu diperlukan penguatan komunitas kelompok tani, dukungan CSR dalam pengembangan program dan juga perlu menambahkan tenaga profesional dari pemerintah pusat di Kabupaten Belu.
	<p><i>This is an open access article under the Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional</i></p> 
Corresponding Author: Adventus Daniel Hamonangan Universitas Indonesia Email: danieladventush@gmail.com	

1. PENDAHULUAN

Indonesia memiliki 3 (tiga) perbatasan darat dengan tiga negara, yaitu Malaysia, Papua Nugini dan Republik Demokratik Timor Leste. Perbatasan negara identik dengan ketertinggalan dibandingkan daerah lainnya. Oleh karena itu, untuk mengubah kondisi tersebut, diperlukan strategi percepatan ekonomi kawasan perbatasan negara. Percepatan ekonomi kawasan perbatasan Indonesia tertuang dalam Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2021 Tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi pada Kawasan Perbatasan Negara di Aruk, Motaain, dan Skouw.

Motaain merupakan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) perbatasan antara NTT dengan Timor Leste yang terletak di Kabupaten Belu. Sebagai percepatan pembangunan ekonomi pada kawasan perbatasan negara, pemerintah melalui Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2021 menyusun program prioritas, di mana prioritas utama di Motaain. Program prioritas tersebut berupa penyediaan bibit sapi dalam rangka peningkatan produksi ternak serta pembangunan rumah potong hewan standar ekspor. Selain itu, pemerintah juga akan membangun kawasan peternakan terpadu di daerah Sonis Laloran, Kabupaten Belu.

Program prioritas yang diberikan oleh pemerintah tidak terlepas dari kontribusi perekonomian kawasan tersebut. Sampai dengan saat ini, sektor pertanian merupakan sektor penyumbang terbesar di Kabupaten Belu. Tercatat bahwa kontribusi sektor usaha dalam perekonomian Kabupaten Belu paling banyak sebesar 41,21% atau hampir setengahnya merupakan di sektor pertanian. Untuk sektor yang paling minim, yaitu sektor Listrik, Gas dan Air Bersih. Hal tersebut dapat dilihat dari tabel di bawah ini.

Tabel 1.1 Kontribusi Sektor Usaha dalam Perekonomian Kabupaten Belu

No.	Jenis Sektor Usaha	Kontribusi (%)
1.	Pertanian	41,21%
2.	Listrik, Gas dan Air Bersih	0,17%
3.	Bangunan	5,90%
4.	Industri Pengolahan	1,65%
5.	Keuangan	4,49%
6.	Pengangkutan dan Komunikasi	6,17%
7.	Jasa-Jasa	24,50%
8.	Perdagangan,hotel dan Restoran	14,77%
9.	Pertambangan dan Penggalian	1,18%

Sumber: RPJMD Belu Tahun 2016-2021

Sub sektor pertanian, yaitu sektor peternakan menjadi sebuah sektor unggulan di Kabupaten Belu, di mana salah satu Produk Unggulan Kabupaten (PRUKAB)-nya ialah sapi (Belukab, 2021). Masyarakat Belu umumnya merupakan peternak yang ditunjang oleh sumber daya dan kondisi alam yang mumpuni untuk beternak (Belukab, 2021). Hal ini kemudian menjadi perhatian Pemerintah Daerah Kabupaten Belu. Banyak program dan kegiatan yang telah dilakukan selama tahun 2017 dalam rangka mengembangkan sektor ini, antara lain pengadaan ternak babi dan sapi, vaksinasi, paronisasi, dan lain sebagainya. Adapun jenis ternak yang dikembangkan di Kabupaten Belu dibagi menjadi dua jenis ternak. Pertama, yakni jenis ternak besar meliputi sapi, kerbau dan kuda. Kedua, yaitu jenis ternak kecil yang terdiri babi, kambing dan domba. Dalam ternak besar, populasi terbanyak adalah sapi sebanyak 64.458 ekor, di mana Kecamatan Tasifeto Timur memiliki populasi tertinggi sebanyak 10.296 ekor sapi (Belukab, 2021). Secara rinci populasi ternak di tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.2 Jenis Ternak di Kabupaten Belu Menurut Kecamatan dan Jenis Ternak

No	Kecamatan	Ternak Besar				Ternak Kecil		
		Sapi Potong	Sapi Perah	Kerbau	Kuda	Babi	Kambing	Domba
1	Kota Atambua	1.122	-	14	5	3.396	352	-

2	Atambua Barat	1.692	-	8	1	1.119	371	-
3	Atambua Selatan	495	-	-	-	998	196	-
4	Lamaknen Selatan	8.722	-	41	143	2.481	464	-
5	Lamaknen	7.259	-	1	50	4.087	285	2
6	Raihat	5.269	-	-	-	2.578	641	8
7	Lasiolat	3.504	-	2	11	1.607	236	4
8	Tasifeto Timur	10.296	-	49	2	3.223	1.524	-
9	Kakuluk Mesak	4.666	-	9	6	2.974	3.211	-
10	Tasifeto Barat	8.585	-	110	3	2.679	1.644	-
11	Nanuet Duabesi	4.163	-	50	74	453	237	-
12	Raimanuk	8.674	11	21	20	2.840	3.515	2
Jumlah		64.447	11	305	315	28.435	12.676	16

Sumber: RPJMD Belu Tahun 2016-2021

Dalam perkembangannya, ternak sapi besar di PLBN Motaain, Kabupaten Belu masih belum berjalan dengan optimal. Hal ini dikarenakan masih minimnya dukungan faktor-faktor pendukung peternakan, seperti ketersediaan prasarana produksi (industri), pasar dan tenaga kerja yang terampil. PLBN Motaain yang ada di Kecamatan Tasifeto Timur adalah salah satu kecamatan yang disebutkan dalam Peraturan Presiden Nomor 179 Tahun 2014 Tentang “Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Nusa Tenggara Timur”. Pasal 6 huruf C dalam perpres tersebut tertulis bahwa salah satu tujuan Penataan Ruang Kawasan Perbatasan Negara untuk mewujudkan kawasan budi daya ekonomi perbatasan yang mandiri dan berdaya saing. Sehingga, masalah pengembangan komunitas di daerah perbatasan menjadi penting untuk dikaji lebih komprehensif. Oleh karena itu, dalam artikel ini maka dihasilkan pertanyaan “Bagaimana strategi pengembangan komunitas peternak sapi di Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur?”

2. KERANGKA TEORI

Pengembangan masyarakat menurut Zubaedi (2013) adalah suatu usaha dalam mengembangkan kondisi masyarakat dengan cara berkelanjutan (*sustainable development*). Pengembangan masyarakat perlu dilakukan secara aktif dengan mengacu pada prinsip-prinsip pengembangan sosial yang mencakup aspek keadilan sosial serta saling menghargai antar pihak. Sedangkan menurut Dunham (1953) pengembangan masyarakat adalah berbagai upaya yang terorganisir untuk meningkatkan kondisi kehidupan masyarakat dan kapasitas masyarakat dalam berintegrasi dan menjadi mandiri. Pengembangan masyarakat menurut Dunham (1953) cenderung mengedepankan pengorganisasian swadaya dan upaya kooperatif dari masyarakat pedesaan dengan bantuan teknis dari pemerintah maupun organisasi sukarelawan. Berbeda halnya, Morley & Ife (2002, p. 63) mendefinisikan bahwa pengembangan masyarakat dapat memberikan sumber daya kesempatan, pengetahuan dan keterampilan kepada masyarakat untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam menentukan masa depannya sendiri, serta berpartisipasi dalam memenuhi kehidupan komunitasnya.

Pengembangan masyarakat dapat dicapai dengan strategi-strategi tertentu. Menurut Ife (1995) terdapat tiga strategi yang dapat diterapkan dalam pengembangan masyarakat. Ketiga strategi tersebut dipaparkan sebagai berikut:

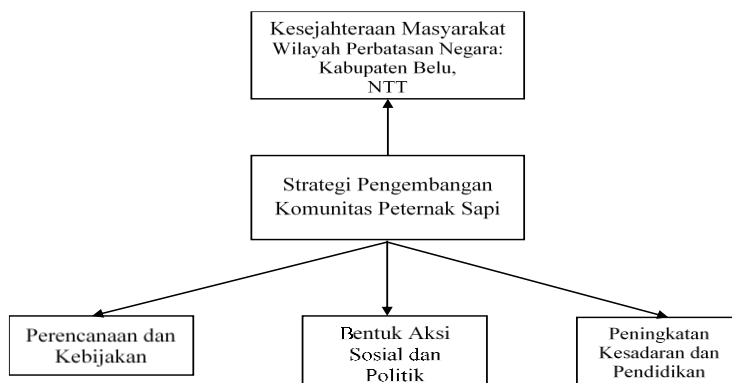
1. Perencanaan dan Kebijakan (*Policy and Planning*), strategi ini mengembangkan perubahan struktur dan institusi sehingga memungkinkan masyarakat untuk mengakses berbagai sumber kehidupan untuk menaikkan standar kehidupan. Dalam penelitian ini, perencanaan dan kebijakan yang berpihak dapat dirancang untuk menyediakan sumber kehidupan yang cukup

- bagi masyarakat untuk memenuhi keberdayaan, semisal kebijakan pemerintah pusat yang membuka sentra ekonomi baru di Kabupaten Belu.
2. Melakukan bentuk Aksi Sosial dan Politik (*Social and Political Action*). Aksi sosial dan politik ini diartikan supaya sistem politik yang tertutup diubah untuk memungkinkan masyarakat berpartisipasi dalam sistem politik. Dalam penelitian ini, adanya keterlibatan masyarakat secara politik membuka peluang dalam memperoleh situasi keberdayaan masyarakat di Kabupaten Belu.
 3. Melakukan peningkatan kesadaran dan pendidikan. Baik masyarakat umum maupun anggota komunitas tertentu seringkali tidak menyadari bahwa sedang terjadi penindasan atas mereka. Kondisi ketertindasan ini diperburuk dengan tidak adanya keterampilan bertahan hidup secara ekonomi dan sosial. Atas permasalahan ini, peningkatan kesadaran dan pendidikan perlu dijalankan. Contoh memberi pemahaman kepada masyarakat tentang bagaimana struktur-struktur penindasan terjadi, memberi saran dan kemampuan agar mencapai perubahan secara efektif.

Pengembangan masyarakat identik dengan pengembangan dalam sebuah komunitas. Menurut Ife (1995) komunitas masyarakat yang menempati wilayah tertentu memiliki beberapa ciri yang merefleksikan wujud organisasi sosial di dalam kehidupan mereka. Ife (1995, p. 191-194) terdapat beberapa cara untuk mengidentifikasi ciri dalam komunitas lokal, seperti skala manusia, identitas dan kepemilikan, kewajiban-kewajiban, pembedaan, dan kebudayaan.

Pengembangan masyarakat melalui komunitas lokal yang berhasil nantinya akan menciptakan kesejahteraan sosial. Seperti yang dikemukakan oleh Zastrow (2010, p. 2), tujuan kesejahteraan sosial adalah untuk memenuhi kebutuhan sosial, keuangan, kesehatan, dan rekreasi semua individu dalam suatu masyarakat. Kesejahteraan sosial berupaya meningkatkan fungsi sosial semua kelompok umur, baik kaya maupun miskin. Ketika lembaga-lembaga lain di masyarakat kita, seperti ekonomi pasar dan keluarga, kadang-kadang gagal memenuhi kebutuhan dasar individu atau kelompok orang, maka layanan sosial diperlukan dan diminta. Zastrow (2010, p. 3) memberikan definisi kesejahteraan sosial sebagai sistem program, manfaat, dan layanan suatu negara yang membantu orang memenuhi kebutuhan sosial, ekonomi, pendidikan, dan kesehatan yang mendasar untuk perawatan masyarakat.

Midgley (1997, p. 5) dalam Adi (Adi, 2015, p. 23). mendefinisikan kesejahteraan sosial sebagai suatu kondisi dalam suatu masyarakat. Midgley melihat kesejahteraan sosial sebagai suatu keadaan atau kondisi kehidupan manusia yang tercipta ketika berbagai permasalahan sosial dapat dikelola dengan baik. Menurut Adi (2015, p. 23), kesejahteraan sosial didefinisikan sebagai suatu keadaan di mana menggambarkan secara ideal suatu tatanan (tata kehidupan) yang meliputi kehidupan material maupun spiritual, dengan tidak menempatkan satu aspek lebih penting dari yang lainnya, tetapi lebih mencoba melihat pada upaya mendapatkan titik keseimbangan. Titik keseimbangan yang dimaksud adalah keseimbangan antara aspek sosial, material, dan spiritual. Suharto (2017, p. 3), mendefinisikan kesejahteraan sosial sebagai kondisi sejahtera (konsepsi pertama), yaitu suatu keadaan terpenuhinya segala bentuk kebutuhan hidup, khususnya yang bersifat mendasar seperti makanan, pakaian, perumahan, pendidikan dan perawatan kesehatan. Pengertian seperti ini menempatkan kesejahteraan sosial sebagai tujuan (end) dari suatu kegiatan pembangunan.



Gambar 2.1 Kerangka Penelitian Strategi Pengembangan Peternak Sapi di Daerah Perbatasan, Kabupaten Belu
Sumber: Olahan Penelitian, 2021

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan yaitu dengan pendekatan kualitatif. Seperti yang dikemukakan oleh Creswell (2009, p. 4), penelitian kualitatif adalah sarana untuk mengeksplorasi dan memahami makna individu atau kelompok yang berkaitan dengan masalah sosial atau manusia. Proses penelitian melibatkan pertanyaan yang muncul dan prosedur data yang biasanya dikumpulkan dalam analisis data partisipan yang membangun secara induktif dari rincian ke tema umum, dan peneliti membuat interpretasi tentang makna data. Laporan tertulis akhir memiliki struktur yang fleksibel. Partisipan yang terlibat dalam penelitian mendukung cara memandang penelitian gaya induktif, fokus pada makna individu dan pentingnya mendeskripsikan proses situasi yang kompleksitas.

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu penelitian deskriptif, karena isi dari penelitian Strategi Pengembangan Komunitas Lokal Peternak Sapi di Daerah Perbatasan, Kabupaten Belu ini akan menggambarkan pertanyaan penelitian. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Neuman, penelitian deskriptif menurut Neuman (2014, p. 38) merupakan penelitian yang tujuan utamanya untuk “memberikan gambaran” dengan menggunakan kata-kata dan angka serta untuk menyajikan profil (persoalan), klasifikasi jenis, atau garis besar tahapan guna menjawab pertanyaan seperti siapa, kapan, di mana dan bagaimana. Lebih lanjut, Neuman (2014, p. 38-39) mengemukakan bahwa penelitian deskriptif menyajikan gambaran spesifik mengenai situasi, penataan sosial, atau hubungan.

Jenis *sampling* pada penelitian ini menggunakan *non probability sampling*, di mana menurut Bryman (2012, p. 187) *non probability sample* merupakan sampel yang belum dipilih menggunakan metode pemilihan acak. Pada dasarnya, ini menyiratkan bahwa beberapa unit dalam populasi lebih cenderung dipilih daripada yang lain. Pada penelitian ini sampel informan dipilih berdasarkan yang memenuhi kriteria. Dalam penelitian ini, penulis mengambil secara acak informan berdasarkan kriteria yang memenuhi penelitian. Berdasarkan kriteria penelitian maka dipilihlah 11 informan dengan komposisi 8 pemerintah daerah dan 3 kelompok tani. Rinciannya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1 Kerangka Pemilihan Informan

Informan	Jumlah
Pegawai BNPP	2
Pegawai PLBN Motaain	1
Pegawai BP4D Kabupaten Belu	1
Pegawai Disperindag Belu	1
Pegawai Dinas Peternakan Belu	2
Pegawai Kesbangpol Belu	1
Kelompok Tani	3
Jumlah	11

Sumber: Olahan Penelitian, 2021

Dalam pengumpulan data, Neuman (2014, p. 51) berpendapat bahwa data kualitatif datang dalam berbagai bentuk: foto, peta, wawancara terbuka, pengamatan, dokumen, dan sebagainya. Seperti yang dikemukakan oleh Neuman, pengumpulan data pada penelitian kali ini menggunakan sumber sekunder dengan perangkat wawancara kepada pemangku kepentingan di kantor pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang berkaitan dengan daerah perbatasan Kabupaten Belu serta komunitas peternak sapi yang ada di Kabupaten Belu. Hal ini dilakukan guna mendapat data terkait kondisi terkini komunitas ternak sapi di Kabupaten Belu berupa

pengalaman mereka dan harapan mereka ke depan juga dilakukan studi kepustakaan. Berikut adalah penjelasannya:

1. *Wawancara*. Peneliti melakukan wawancara dengan pemangku kepentingan di kantor pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang berkaitan dengan daerah perbatasan Kabupaten Belu serta komunitas ternak sapi yang ada di Kabupaten Belu untuk menggali informasi terkait strategi pengembangan komunitas peternak sapi di Kabupaten Belu. Wawancara dapat dilakukan dengan wawancara langsung (*face to face interview*), wawancara menggunakan media telepon, atau wawancara dengan membentuk kelompok diskusi. Dalam wawancara, peneliti melibatkan pertanyaan-pertanyaan tidak terstruktur dan pertanyaan-pertanyaan terbuka dalam jumlah yang sedikit untuk memperoleh pandangan dan pendapat informan terkait topik penelitian (Creswell, 2009).
2. *Studi Kepustakaan*. Peneliti melakukan studi kepustakaan untuk mendapatkan data sekunder berupa *running records* terkait strategi pengembangan komunitas peternak sapi di Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur yaitu kebijakan dan dokumen statistik yang telah ada dan disimpan secara teratur.

Setelah pengumpulan data, maka dilakukan analisis data. Analisis data merupakan upaya mencari dan menata data secara sistematis untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain. Menurut Neuman (2014, p. 480-484) analisis penelitian kualitatif bersifat induktif. Analisis induktif pada penelitian kualitatif dapat digunakan untuk melihat hubungan dari data yang dikumpulkan, namun analisis kualitatif ini tidak dapat menggambarkan secara luas berdasarkan data statistik dan matematika. Neuman (2014, p. 481- 484) membagi analisis data menjadi 3 bagian, yaitu *open coding*, *axial coding* dan *selective coding*.

1. *Open coding*, yaitu pengkodean pertama dari data kualitatif yang menguji data untuk memadatkannya ke dalam kategori atau kode analitik awal. *Open coding* dilakukan dibuat berdasarkan pedoman wawancara yang sudah disusun penulis sebelum melaksanakan penelitian mengenai strategi pengembangan masyarakat diperbatasan negara Kabupaten Belu.
2. *Axial coding*, yaitu tahap kedua pengkodean data kualitatif di mana penulis mengatur kode, menghubungkannya, dan menemukan kategori analitik utama. Pada tahapan *axial coding*, penulis dapat mendapatkan sub kategori dari hasil penelitian pada kelompok peternak sapi di Kabupaten Belu, wilayah perbatasan negara.
3. *Selective coding*, yaitu tahap terakhir dalam pengkodean data kualitatif yang menguji kode sebelumnya untuk mengidentifikasi dan memilih data yang akan mendukung kategori pengkodean konseptual yang dikembangkan. Pada *selective coding* sudah menemukan tema yang spesifik dari hasil observasi dan wawancara sebelumnya yaitu mengenai strategi pengembangan komunitas peternak sapi di Kabupaten Belu.

Setelah melakukan analisis data, maka diperlukan triangulasi untuk menentukan validitas hasil penelitian. Menurut Creswell (2009, p. 199-200) dalam memastikan validitas internal, diperlukan sebuah verifikasi, dimana verifikasi dalam penelitian kualitatif dapat digunakan strategi salah satunya yaitu triangulasi. Triangulasi yaitu data-data akan dikumpulkan melalui berbagai sumber untuk menyertakan wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Triangulasi yang dilakukan oleh penulis yaitu melakukan verifikasi hasil wawancara pemerintah dengan kelompok peternak sapi.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penelitian Strategi Pengembangan Kelompok Peternak Sapi di Perbatasan Negara, Kabupaten Belu menghasilkan beberapa kondisi yang selanjutnya akan dianalisis menggunakan teori yang relevan.

4.1 Hasil Penelitian

Temuan hasil penelitian Strategi Pengembangan Kelompok Peternak Sapi di Perbatasan Negara, Kabupaten Belu yaitu sebagai berikut:

4.1.1 Pendampingan dan Pelatihan Pemerintah Daerah Kepada Peternak Sapi

Pendampingan dan pelatihan kepada peternak sapi merupakan salah satu faktor pendukung dalam pengembangan masyarakat di Kabupaten Belu. Pendampingan kepada komunitas ini diberikan oleh berbagai pihak, mulai dari kepala desa dan tokoh-tokoh masyarakat di mana peternak berada. Pendampingan pertama berasal dari kepala desa sesuai asal kelompok peternak sapi. Selain itu, pendampingan diberikan pula oleh BNPP dalam mempersiapkan program pemerintah pusat yang akan memberikan 700 ekor bibit sapi betina pada tahun 2022. Pendampingan juga diberikan Bidang Penyuluhan Dinas Peternakan Kabupaten Belu untuk membimbing masyarakat berkaitan dengan pengelolaan pakan ternak.

Inseminasi terhadap sapi merupakan salah satu bentuk pendampingan pemerintah daerah Kabupaten Belu. Hal ini dilakukan karena kapasitas peternak sapi yang belum dapat melakukannya sendiri. Dalam inseminasi buatan bukan hanya pemberian obat suntik berupa vitamin, tapi juga membutuhkan palpasi. Sehingga, membutuhkan orang yang sudah terlatih seperti dokter hewan. Namun, untuk kedepannya tidak menutup kemungkinan bahwa peternakan mandiri akan dilatih. Tetapi hingga saat ini pemerintah daerah Kabupaten Belu belum melihat sejauh itu. Dengan adanya pendampingan ini masyarakat tidak hanya mampu merawat ternak, tapi juga merawat ketersediaan pakan ternak. Pendampingan ini mempertimbangkan kondisi iklim di Kabupaten Belu yang memiliki masa-masa kekeringan atau musim gersang dimana pada waktu tersebut daun-daun yang digunakan sebagai pakan ternak dapat berguguran.

Selain pendampingan inseminasi terhadap sapi, terdapat pelatihan yang diberikan berupa pengolahan pakan untuk ternak ruminansi, dan juga tata cara budidaya hijauan pakan ternak. Pelatihan tersebut dilaksanakan pada tahun 2019 dengan jangka waktu satu minggu. Pelatihan tersebut dilakukan oleh pemerintah daerah setempat maupun tenaga profesional. Namun, kendala sampai dengan saat ini tenaga profesional hanya bersifat sementara, sehingga pemerintah memerlukan bantuan dari pemerintah pusat untuk memperkerjakan tenaga profesional secara tetap seperti dokter hewan di daerah mereka.

4.1.2 Mendatangkan Tenaga Ahli untuk Membantu Menyelesaikan Permasalahan Peternak Sapi

Dalam memaksimalkan kelompok peternak sapi, maka diperlukan tenaga ahli untuk melakukan peternakan yang benar. Pemerintah daerah berperan aktif dalam membantu pengajuan proposal kepada lembaga pendidikan. Salah satu lembaga pendidikan yang pernah ikut serta membantu mendampingi komunitas berasal dari Universitas Brawijaya.

Tenaga ahli bukan hanya didatangkan dari universitas yang ada di Indonesia, namun juga pemerintah setempat mendatangkan ahli peternakan yang berasal dari Belanda. Tenaga ahli yang didatangkan dipergunakan untuk membantu peternak sapi dalam memelihara sapi yang baik di kala musim kemarau, karena pada saat musim kemarau ternak sapi Kabupaten Belu selalu mati karena kekurangan air dan pakan.

4.1.3 Penguatan Internal Kelompok Peternak Sapi

Penguatan internal kelompok perlu untuk dilakukan mengingat banyak kelompok peternak sapi yang tidak bertahan lama. Penguatan kelompok berupa pembuatan kegiatan dari inisiatif kelompok sendiri, seperti pengembangan pakan ternak, lamtoro taramba dan membuat posyandu-posyandu ternak. Selain itu,

kegiatan yang tidak berhubungan dengan peternakan pun perlu dilakukan untuk memperkuat kelompok. Seperti membuat arisan ternak. Arisan dilakukan sebulan sekali dengan biaya Rp. 20.000/bulan. Arisan ternak pun menjadi ajang diskusi mengenai kegiatan atau pun permasalahan dalam kelompok. Jika terdapat masalah, anggota kelompok akan memberikan dukungan sosial berupa semangat kepada anggota kelompok lainnya. Hal ini merupakan salah satu strategi agar kelompok peternak semakin kuat.

Penguatan internal pun perlu untuk dilakukan untuk meminimalisir implementasi program/kegiatan berlangsung menjadi tidak efektif. Sejauh ini, banyak anggota kelompok hanya ingin masuk komunitas secara administrasi, namun tidak mengikuti kegiatan yang seharusnya dilakukan oleh kelompok peternak tersebut. Selain itu, ketika bantuan telah selesai, maka anggota komunitas akan dibubarkan.

4.1.4 Bantuan Peralatan Penunjang Peternakan dari Pemerintah

Peralatan penunjang peternakan sangat diperlukan oleh komunitas peternak sapi. Namun, hal ini menjadi kendala yang dirasakan sampai dengan saat ini oleh peternak sapi. Minimnya peralatan dalam menunjang kegiatan peternak sapi menjadikan peternak tidak dapat melakukan kegiatan secara maksimal. Peralatan yang dibutuhkan seperti alat untuk menyiram lamtoro karena pada saat musim panas, lamtoro akan berguguran. Jika hal tersebut terjadi, maka peternak sapi akan mengambil pakan rumput di pinggir kali. Jika petani mengambil pakan rumput di pinggir kali, diperlukan motor air. Peralatan lainnya yang diperlukan oleh peternak yaitu alat pencacah pakan ternak. Sampai dengan saat ini petani belum mendapatkan bantuan peralatan tersebut. Padahal, pemerintah dapat melakukan ini dengan cara bekerjasama dengan sektor swasta.

4.1.5 Pemberian Intensif oleh Pemerintah

Pemberian intensif pemerintah merupakan salah satu strategi pemerintah agar peternakan sapi dapat berkelanjutan. Intensif akan diberikan ketika peternak sapi masuk ke dalam rumah singgah ternak agar sapi mereka dilakukan inseminasi. Tentunya terdapat prosedur yang harus dilakukan, yaitu setelah pemilik sapi mendapatkan anak, pemilik sapi diwajibkan untuk melapor. Jika melapor, dinas pertanian setempat akan memberikan intensif dana sebesar Rp. 500.000; Intensif tersebut diberikan dengan tujuan bukan hanya ternak lahir menjadi bagus saja, namun juga dapat menjadi semangat untuk peternak agar mengejar inseminasi. Sehingga, inseminasi saat ini menjadi lebih baik karena hal ini merupakan salah satu penarik bagi peternak sapi dalam melakukan inseminasi sehingga nantinya akan mendapatkan anak sapi yang lebih baik dari biasanya.

4.1.6 Pembuatan Pasar Rakyat untuk Memasarkan Hasil Ternak Sapi

Pembuatan pasar merupakan salah satu strategi pemerintah dalam penyaluran hasil ternak peternak sapi. Pemerintah telah mempersiapkan pasar agar peternak tidak kesulitan dalam menjual hasil ternak mereka. Landasan dalam pembuatan pasar raya yaitu Inpres No. 1 Tahun 2021. Pasar yang dibuat yaitu berupa Pasar Raya. Dengan adanya pasar raya, pemerintah berharap terjadinya transaksi dimana petani tidak langsung membawa hasil taninya ke kota, ke pasar induk, tapi ada transaksi di pasar antara, pasar penghubung. Penjualan bukan dilakukan oleh petani, namun oleh BUMDES ataupun koperasi. Sehingga, peternak fokus kepada kegiatan produksi.

4.2 Pembahasan

Dalam mencapai kesejahteraan masyarakat di perbatasan negara, pemerintah memerlukan berbagai strategi untuk mencapai hal tersebut. Seperti yang dikemukakan oleh Zastrow (2010, p. 3) dimana kesejahteraan sosial sebagai sistem program, manfaat,

dan layanan suatu negara yang membantu orang memenuhi kebutuhan sosial, ekonomi, pendidikan, dan kesehatan yang mendasar untuk perawatan masyarakat. Sehingga dengan demikian, dalam menyejahterakan masyarakat Kabupaten Belu sebagai daerah perbatasan dengan Timor Leste, maka diperlukan strategi pemerintah dalam mencapai hal tersebut.

Komunitas peternak sapi sebagai mata pencaharian dengan kontribusi terbesar di bidang peternakan Kabupaten Belu. Sehingga, dalam mencapai kesejahteraan masyarakat, dapat dengan melalui pengembangan komunitas peternak sapi. Namun, hal ini memerlukan strategi khusus agar hal tersebut berjalan dengan baik. Seperti yang dikemukakan oleh Ife (1995), pengembangan masyarakat dapat dicapai dengan strategi-strategi tertentu. Menurut Ife (1995) terdapat tiga strategi yang dapat diterapkan dalam pengembangan masyarakat. Sehingga, pada pembahasan penelitian ini akan menggunakan teori Ife untuk mempertajam analisis penelitian.

4.2.1 Perencanaan dan Kebijakan (*Policy and Planning*)

Seperti yang dikemukakan oleh Ife (1995), strategi ini mengembangkan perubahan struktur dan institusi sehingga memungkinkan masyarakat untuk mengakses berbagai sumber kehidupan untuk menaikkan standar kehidupan. Dalam penelitian ini, pemerintah pusat telah mengeluarkan kebijakan melalui Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2021 Tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi pada Kawasan Perbatasan Negara di Aruk, Motaain, dan Skouw. Kabupaten Belu sebagai daerah perbatasan Motaain merupakan salah satu daerah yang mendapatkan program prioritas percepatan dengan menggelontorkan program penyediaan bibit sapi dalam rangka peningkatan produksi ternak serta pembangunan rumah potong hewan standar ekspor. Selain itu, pemerintah juga akan membangun kawasan peternakan terpadu di daerah Sonis Laloran, Kabupaten Belu.

Pengeluaran kebijakan tersebut, tidak terlepas dari perencanaan yang telah disusun matang oleh *stakeholders*, khususnya yaitu pemerintah pusat dan pemerintah daerah Kabupaten Belu sebagai penentu kebijakan. Perencanaan yang matang akan menghasilkan kebijakan yang efektif. Begitupula dengan kebijakan Presiden No. 1 Tahun 2021. Dalam Inpres tersebut, program prioritas pada Motaain di fokuskan pada peternak sapi, selain penataan infrastruktur. Ternak sapi merupakan mata pencaharian tertinggi dibidang peternakan. Sehingga, perencanaan yang dilakukan oleh pemerintah bersifat *bottom-up* yaitu dengan menghargai keterampilan lokal. Seperti yang dikemukakan oleh Ife dan Tesoriero (2014, p. 257) bahwa keterampilan lokal dapat dengan mudah terlewat oleh masyarakat yang bersemangat. Keterampilan lokal dapat lebih memberdayakan masyarakat. Strategi lainnya dalam perencanaan kebijakan yaitu pemerintah mempersiapkan pasar raya untuk menjual hasil ternak sapi. Hal ini dilakukan agar program dapat berjalan dengan maksimal.

4.2.2 Bentuk Aksi Sosial dan Politik

Menurut Ife (1995) bentuk aksi sosial dan politik diperlukan supaya sistem politik yang tertutup diubah untuk memungkinkan masyarakat berpartisipasi dalam sistem politik. Lebih lanjut, dalam bentuk aksi sosial dan politik dapat dilakukan dengan pengembangan politik. Menurut Ife dan Tesoriero (2014, p. 437-438) pengembangan politik terbagi menjadi 2 (dua), yaitu internal dan eksternal. Pengembangan politik internal terkait dengan partisipasi dan pembuatan keputusan dalam masyarakat. Seperti dalam penelitian ini, kelompok peternak sapi membuat keputusan dalam pembentukan kelompok peternak dan membuat keputusan tersendiri di dalam kelompok dengan melakukan musyawarah/diskusi.

Kegiatan yang telah dilakukan dalam partisipasi kelompok yaitu dalam pelatihan-pelatihan serta permintaan fasilitasi kepada universitas dan juga pemerintah terkait dengan pengadaan alat peternakan. Selain itu, hal yang berpengaruh dalam memperkuat internal yaitu berupa dukungan sosial dari sesama anggota kelompok. Beberapa kelompok peternak sapi memberikan dukungan sosial tersebut sembari melakukan arisan bulanan yang bertujuan untuk mempererat kelompok.

Sedangkan eksternal menurut Ife dan Tesoriero (2014, p. 441) yaitu *organizing* yang melibatkan masyarakat dalam membuat struktur yang tidak hanya membuatnya akan beroperasi dalam cara yang demokratis dan inklusif, namun juga akan membantu dalam meningkatkan kewenangan yang efektif dalam arena yang lebih luas. Seperti dalam penelitian ini, dalam memenuhi kebutuhan program pemberian bibit sapi, diperlukan kelompok peternak sapi yang terdiri dari minimal 30 orang. Dalam setiap kelompok diperlukan satu orang ketua yang dapat mengatur kelompoknya. Ketua yang terpilih merupakan orang yang berpengaruh dan memiliki kapasitas dalam memimpin. Hal ini diperlukan agar dinamika kelompok dapat terkendali dengan baik.

Dalam politik secara eksternal pun diperlukan partisipasi kelompok untuk melakukan komunikasi dengan pihak di luar kelompok tersebut. Seperti halnya dalam penelitian ini diperlukan diskusi dengan pemerintah setempat atau dengan pemerintah pusat terkait kebutuhan akan motor air untuk pakan ternak di kala musim kemarau, alat untuk menyiram lamtoro karena pada saat musim panas, dan juga alat pencacah akan ternak. Jika aspirasi tersebut tidak tersampaikan dengan baik, maka kebutuhan akan peralatan peternak tidak akan terealisasikan dengan baik.

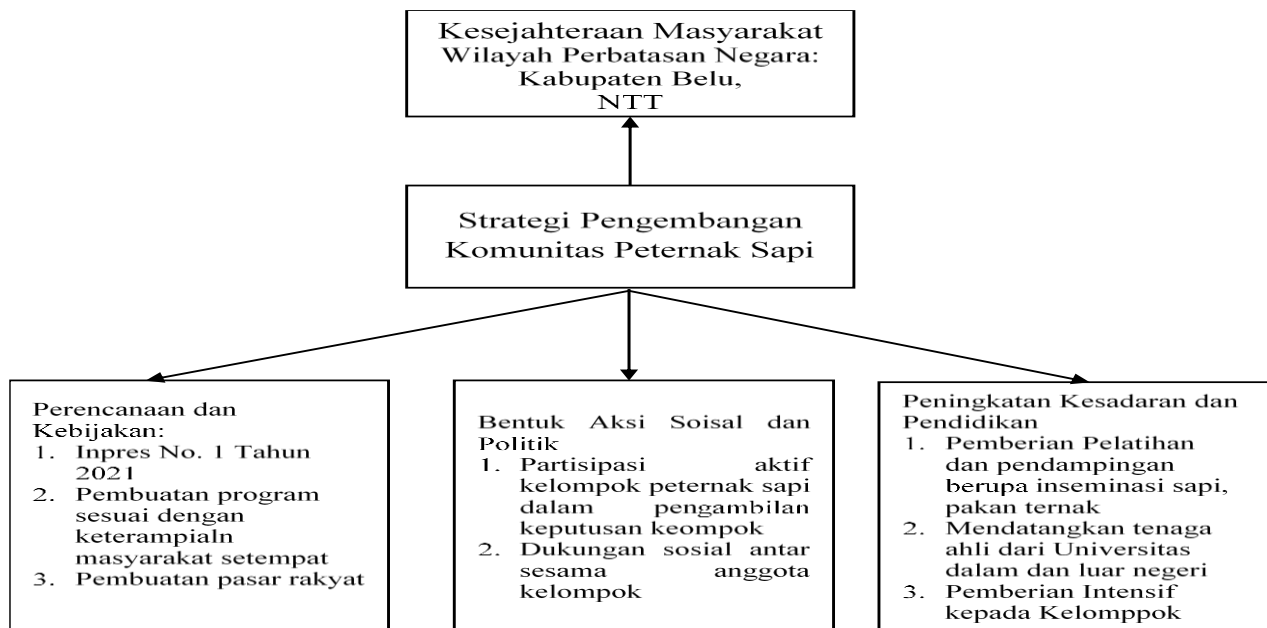
4.2.3 Tindakan Kesadaran dan Pendidikan

Pelatihan-pelatihan serta pendampingan banyak dilakukan oleh pemerintah setempat kepada peternak. Hal ini untuk menumbuhkan kesadaran bahwa terdapat *skill* yang harus ditingkatkan. Sejalan dengan pendapat menurut Ife (1995) bahwa baik masyarakat umum maupun anggota komunitas tertentu seringkali tidak menyadari bahwa sedang terjadi penindasan atas mereka. Kondisi ketertindasan ini diperburuk dengan tidak adanya keterampilan bertahan hidup secara ekonomi dan sosial. Atas permasalahan ini, peningkatan kesadaran dan pendidikan perlu dijalankan. Peningkatan kesadaran yang dilakukan pemerintah Kabupaten Belu yaitu melalui pelatihan Kelompok peternak di Kabupaten Belu mendapat pelatihan dari pemerintah daerah melalui Dinas Peternakan Kabupaten Belu.

Pelatihan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Belu bermacam-macam seperti pelatihan inseminator, yaitu inseminasi buatan pada ternak sapi, pengolahan pakan untuk ternak ruminansi, dan juga tata cara budidaya hijauan pakan ternak. Pelatihan tersebut dilaksanakan pada tahun 2019 dengan jangka waktu satu minggu. Pelatihan dan pendampingan yang diberikan pemerintah tidak semuanya dapat dilakukan oleh peternak. Seperti inseminasi terhadap sapi peternak, harus dilakukan oleh tenaga ahli. Hal ini bisa menjadi sebuah keterampilan baru bagi peternak sehingga nantinya dapat menjadi peternak mandiri. Selain itu, sebelum Inpres No. 1 Tahun 2021 dikeluarkan, pemerintah telah membuat program/kegiatan berupa pelatihan-pelatihan kepada peternak sapi. Sehingga ketika kebijakan tersebut akan diimplementasikan pada tahun 2022, pemerintah daerah beserta peternak sapi di Kabupaten Belu telah siap menjalankan program tersebut. Namun, kekurangan sampai dengan saat ini pemerintah daerah kekurangan tenaga profesional seperti dokter hewan. Oleh karena itu, peran

pemerintah pusat dalam pengadaan tenaga profesional sangat dibutuhkan oleh pemerintah daerah.

Dari pembahasan di atas, maka dihasilkan sebuah skema sebagai berikut:



Gambar 3.1 Hasil Penelitian Strategi Pengembangan Komunitas Peternak Sapi di Daerah Perbatasan, Kabupaten Belu

Sumber: Olahan Penelitian, 2021

5. KESIMPULAN

Kesejahteraan masyarakat di daerah perbatasan, Kabupaten Belu akan tercipta jika strategi pengembangan komunitas dilakukan secara tepat. Seperti dalam pengembangan komunitas peternak sapi. Strategi *pertama* dalam pengembangan komunitas peternak sapi yaitu mengenai perencanaan dan kebijakan. Perencanaan yang bersifat *bottom up* dengan memperhatikan keterampilan masyarakat Kabupaten Belu menghasilkan kebijakan yang tepat, yaitu melalui Inpres No. 1 Tahun 2021, daerah perbatasan Motaain diberikan program pemberian bibit sapi kepada peternak sapi yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Belu, maka masyarakat tidak mencari penghasilan dari luar negara. Selain itu, pemerintah daerah mempersiapkan pasar raya untuk pemasaran hasil ternak sapi. Strategi *kedua* yaitu terdapat aksi politik dan sosial yang dilakukan oleh kelompok tani, seperti partisipasi kelompok tani dalam pengambilan keputusan dan juga pemberian dukungan sosial di antara sesama peternak sapi. Strategi *ketiga* yaitu dengan kesadaran dan pendidikan di mana peternak sapi diberikan pelatihan. Pelatihan yang diberikan bermacam-macam seperti pelatihan inseminator, yaitu inseminasi buatan pada ternak sapi, pengolahan pakan untuk ternak ruminansi, dan juga tata cara budidaya hijauan pakan ternak. Pelatihan pun dipersiapkan sebelum program Presiden dalam Inpres No. 1 Tahun 2021 dimulai. Dengan demikian ketika program prioritas presiden diimplementasikan, peternak sapi sudah siap menjalankan program tersebut. Namun, pelatihan yang diberikan saat ini belum ada yang mengarah kepada penguatan komunitas. Sehingga, banyak kelompok peternak yang dibuat hanya ketika ada bantuan dari pemerintah.

Dari kesimpulan di atas, terdapat beberapa rekomendasi, yaitu sebagai berikut:

1. Perlu adanya bantuan alat penunjang kegiatan bagi peternak sapi. Pemerintah dapat memenuhi alat penunjang kegiatan peternakan ini melalui kerjasama *Corporate Social Responsibility* (CSR) sektor swasta.

2. Perlu adanya pelatihan dalam penguatan komunitas peternak sapi, karena selama ini pelatihan hanya difokuskan pada pengelolaan ternak sapi.
3. Perlu adanya penambahan tenaga ahli dalam bidang peternakan di Kabupaten Belu.

6. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih penulis ucapkan kepada dosen beserta civitas academia Ilmu Kesejahteraan Sosial Universitas Indonesia, terutama pembimbing tesis penulis yaitu Prof. Bambang Shergi Laksmono, M.Sc. yang telah meluangkan waktunya kepada penulis dalam membimbing penulis dengan sepenuh hati.

7. DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Isbandi Rukminto. (2015). *Kesejahteraan sosial*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Bryman, A. (2012). *Social Research Methods (4th)*. . New York: Oxford University Press.
- Creswell, J. W. (2007). *Qualitative Inquiry & Research Design Choosing Among Five Approaches*. California: Sage Publication Inc.
- Creswell, J. W. (2009). *Research design: quantitative and qualitative approach (3th)*. London: Sage Publication.
- Dunham, A. (1953). *The Outlook for Community Development: An International Symposium*. University of Michigan.
- Ife, J. W. (1995). *Community development: Creating community alternatives-vision, analysis and practice*. Melbourne: Longman Australia.
- Ife, Jim dan Frank Tesoriero. (2014). *Community Development: Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Inpres Nomor 1 Tahun 2021 *Tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Pada Kawasan Perbatasan Negara di Aruk, Montain, dan Skouw*.
- Morley, L. & Ife, J. (2002). *Social Work And A Love of Humanity*. Australian Social Work, 55(1), 69-77.
- Neuman, W. L. (2014). *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches (7th ed.)*. Assex: Pearson Education Limited.
- Peraturan Presiden Nomor 179 Tahun 2014 *Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Nusa Tenggara Timur*.
- RPJMD Belu (n.d). *BAB II: Gambaran Umum Kondisi Wilayah*. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Belu Tahun 2016-2021.
- Suharto, Edi. (2017). *Membangun masyarakat memberdayakan rakyat: kajian strategis pembangunan kesejahteraan sosial & pekerjaan sosial*. Bandung: Refika Aditama.
- Zastrow, C. (2010). *Introduction to Social Work and Social Welfare Empowering people (Ten Edition)*. USA: Thomson Learning.
- Zubaedi. (2013). *Pengembangan Masyarakat: Wacana & Praktik*. Jakarta: Kencana.